

**PEMERINTAH OTORITER MESIR DI BAWAH PRESIDEN ABDEL
FATTAH AL SISI PASCA KUDETA MILITER TAHUN 2013**

*(The Authoritarian Government of Egypt under President Abdel Fattah Al Sisi
Administration after Military Coup 2013)*

BINTANG MEI SYIAM ASTRI ILMANIA

20050510052

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta, 55183

bintangmeisyiam@gmail.com

Abstract

Gelombang revolusi Arab Spring tahun 2011 di Timur Tengah telah berhasil meruntuhkan rezim otoriter negara-negara Arab seperti Tunisia, Libya dan Mesir. Di Mesir, revolusi Arab Spring berhasil menumbangkan rezim militer Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun. Pasca revolusi yang terjadi pada 25 Januari 2011, untuk pertama kalinya Mesir kemudian dipimpin oleh presiden dari kalangan sipil. Hal ini menjadikan kekuasaan rezim militer Mesir yang telah mengakar sejak tahun 1952 kemudian tersingkirkan oleh pemerintahan demokrasi Presiden Muhammad Mursi dari Ikhwanul Muslimin. Berbagai upaya dilakukan Dewan Agung Militer (SCAF) Mesir untuk kembali menguasai pemerintahan. Menginjak satu tahun demokrasi, militer Mesir di bawah komando Abdel Fattah Al Sisi melakukan kudeta militer terhadap Presiden Mursi. Pasca kudeta, pemerintahan Mesir kembali dikuasai oleh rezim militer.

Arab Spring revolution wave in 2011 in the Middle East succeeded over through the autoritary regime in Arab state like Tunisia, Libya and Egypt. In Egypt, Arab Spring revolution over through military regime Hosni Mubarak for 30 years. After the revolution, on January 25 2011, for the first time, Egypt was led by the president from civil society. This problem, make Egypt military regime stronger since 1952 then get rid of democracy of government by President Muhammad Mursi from Moslem Brotherhood. Various effort done by SCAF Egypt to be back to dominate the government. Reaching one year of democracy, Egypt military led by Abdel Fattah Al Sisi military couped to President Mursi. After the coup, Egypt government is back to military regime.

Keywords : Autoritary Goverment, Military Regime, Coup, Egypt, Middle East

A. Pendahuluan

Sejak tahun 1952 hingga tahun 2011, politik pemerintahan Mesir didominasi oleh kalangan militer. Peran dan kekuatan militer selama lebih dari 50 tahun menjadikan Mesir berada di bawah naungan rezim otoriter yang diktaktor. Pada tahun 1952, kepemimpinan Raja Farouk diambil alih oleh kalangan “Perwira Bebas” pimpinan Gamal Abdel Nasser. Di bawah komando Nasser, sistem pemerintahan Mesir kemudian berubah, dari Kerajaan menjadi Republik. Nasser juga bersikap otoriter terhadap gerakan Islam yang tumbuh subur di Mesir, salah satunya kelompok Ikhwanul Muslimin (IM) yang didirikan oleh Hasan al Banna pada tahun 1928. (Basyar, 2015).

Setelah Nasser meninggal dunia pada tahun 1970, kepemimpinan Mesir digantikan oleh wakil presiden, Mohammed Anwar Al Sadat. Pemerintahan yang dijalankan Sadat juga bersifat militeristik. Namun berbeda dengan Nasser yang cenderung “kiri”, Sadat membangun sistem pemerintahan sekuler yang cenderung “kanan”. Pada masa pemerintahan Nasser, Mesir dibangun dalam ideologi “Nasseris” yang sosialis nasionalis, sedangkan pada masa pemerintahan di bawah kendali Sadat terbukanya sedikit ruang bagi politik dan ekonomi. Kebijakannya yang bersifat terbuka ini, ia gunakan untuk menghimpun dukungan dari gerakan Islam Ikhwanul Muslimin. Pada tahun 1972, Sadat membebaskan sekelompok tahanan politik dari kalangan IM. Meski demikian dalam kesempatan lain, Sadat tetap bersikap represif terhadap gerakan Islam yang menentang pemerintahannya. Sikap otoriter Sadat yang dinilai melanggar HAM ini mendapat kecaman dari dunia internasional. Kepemimpinan Sadat berakhir setelah dirinya ditembak mati oleh rakyatnya sendiri (Basyar, 2015).

Dua minggu setelah kematian Sadat, pada 14 Oktober 1981, wakil presiden Hosni Mubarak resmi menduduki kursi kepresidenan Mesir. Sebagai Mantan Komandan Angkatan Udara Mesir, tidak dapat dipungkiri lagi sikap otoriter melekat pada kebijakan-kebijakan Hosni Mubarak selama 30 tahun memimpin Mesir. Hingga akhirnya, gelombang revolusi Timur Tengah pada tahun 2011 berhasil menumbangkan rezim otoriter Mubarak (Basyar, 2015).

Pecahnya revolusi yang melanda negara-negara di Timur Tengah sejak akhir tahun 2010, menjadi momentum merebaknya demokratisasi di kawasan strategis ini. Semula negara-negara di kawasan Timur Tengah, selama bertahun-tahun berjalan di bawah

kepemimpinan rezim otoriter yang korup dan represif, seperti Presiden Zine El Abidine Ben Ali (Ben Ali) di Tunisia, Hosni Mubarak di Mesir, dan Muammar Gaddafi di Libya.

Gelombang demokratisasi di Timur Tengah yang juga dikenal dengan sebutan *Arab Spring* atau Musim Semi Arab ini bermula dari aksi protes seorang pemuda bernama Mohammed Bouazizi (Bouazizi) di Tunisia. Bouazizi, seorang pedagang buah melakukan aksi protes dengan jalan membakar diri karena kecewa terhadap ketidakadilan pemerintahan Presiden Ben Ali (Muttaqien, 2015). Tidak ada yang menyangka, aksi bakar diri Bouazizi ini menjadi penyulut demonstrasi besar-besaran di Tunisia hingga berujung pada penyerahan tampuk kepemimpinan Presiden Ben Ali (Nashrullah, 2015).

Pecahnya demonstrasi di Tunisia yang dikenal sebagai peristiwa Revolusi Melati (*Jasmine Revolution*) dengan cepat menyebar di negara-negara Timur Tengah, mulai dari Mesir, Libya, Yaman hingga ke Suriah (Rahman, 2011). Organisasi masyarakat dari berbagai kalangan dan kelompok radikal turun ke ruas jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa menuntut sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Pasalnya, sebagian besar negara di Timur Tengah menganut sistem monarki absolut atau semi demokrasi yang otoriter (Nashrullah, Propaganda Demokrasi di Tengah Musim Semi, 2015).

Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa 32 tahun di Mesir juga terpapar gelombang demokrasi. Pemerintahan Mubarak yang terkenal korup dan otoriter menjadi pemicu sejumlah aksi demonstrasi di beberapa kota di Mesir. Pecahnya Revolusi Mesir pada 25 Januari 2011 ini berawal dari gerakan anti rezim-Mubarak yang digawangi para aktivis Mesir melalui jejaring sosial *Facebook*. Aktivis Mesir, Asmaa Mahfouz merilis seruan aksi protes di Tahrir Square pada 25 Januari 2011. Seruan aksi protes yang dirilis pada 18 Januari 2011, menjadi penggerak ribuan rakyat Mesir turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besaran di Lapangan Tahrir, Kairo menuntut rezim otoriter Hosni Mubarak untuk turun dari jabatannya (Mandey, 2014).

Demonstrasi besar-besaran yang berlangsung selama 18 hari di Mesir akhirnya mampu menumbangkan rezim otoriter Mubarak. Pada tanggal 11 Februari 2011, Mubarak resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah melimpahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden Omar Suleiman sebagai presiden de facto sejak tanggal 10 Februari 2011. Berakhirnya rezim Mubarak menjadikan Mesir mengalami kekosongan pemimpin. Pemerintahan Mesir kemudian diambil alih oleh Dewan Agung Militer (*Supreme Council*

of the Armed Forces-SCAF) di bawah pimpinan Mohamed Hussein Tantawi. SCAF sepenuhnya mengontrol kekuasaan eksekutif Mesir (Abdurahman, *Dinamika Pemerintahan Mesir Menuju Negara Yang Demokratis: Ditandai Persaingan Antara Demokrat Islam Dengan Militer*, 2014).

Jatuhnya rezim Mubarak tidak serta merta mengakhiri kekuasaan militer di Mesir. Pasca Mubarak mundur dari jabatannya, pemerintahan sementara Mesir dipegang oleh SCAF. Bahkan untuk memperkuat posisi militer, pada tanggal 30 Maret 2011 SCAF membuat amandemen terbatas pada Konstitusi Mesir. Namun rakyat Mesir dan dunia internasional tetap mendesak proses demokrasi di Mesir untuk tetap dilanjutkan. Oleh karena itu SCAF memberi peluang kepada elite sipil untuk masuk dalam dunia politik pemerintahan Mesir melalui pemilu (Basyar, 2015).

Kemenangan Partai FJP dalam tiga tahap pemilu parlemen memberikan angin segar bagi oposisi Ikhwanul Muslimin. Selanjutnya dalam pemilu presiden, Partai Islam, FJP yang baru didirikan IM pada 22 Februari 2011 ini mengusung Muhammad Mursi sebagai calon presiden. Pada 24 Juni 2012, Mursi menang dalam pemilu putaran kedua. Untuk pertama kalinya sepanjang perjalanan politik Mesir, Mursi dari kalangan elit sipil terpilih sebagai presiden secara demokratis melalui pemilu. Hal ini menunjukkan keberlangsungan proses demokrasi di Mesir pasca tumbangannya rezim otoriter yang telah menaungi Mesir sejak tahun 1952. Meskipun demikian, pemerintahan Mursi tetap berada dalam bayang-bayang militer, dimana SCAF tetap memiliki otoritas untuk memilih Dewan Konstituante baru (Lisbet, 2013).

Sejak dilantik menjadi Presiden Mesir pada 30 Juni 2012, Mursi menunjukkan sikap yang bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam memulihkan anggota parlemen yang dibubarkan MK, Mursi mengeluarkan Dekrit 8 Juli 2012. Namun hal ini tidak menggoyahkan keputusan MK. Parlemen tetap dibubarkan pada 17 Juli 2012. Tidak lama berselang, Mursi kembali mengeluarkan Dekrit 12 Agustus 2012 yang berisi pembatalan kekuasaan SCAF di tingkat legislatif. Peran Militer Mesir semakin lemah, terlebih ketegangan antara Presiden Mursi dengan militer berujung pada pemecatan Kepala SCAF, Mohamed Hussein Tantawi. Hanya selang beberapa bulan, Mursi kembali mengeluarkan Dekrit 22 November 2012 yang menjadikan Mursi berkuasa hampir tanpa batas. Sikap Mursi dalam menekan kekuasaan Militer Mesir akhirnya menuai protes rakyat, terutama dari kubu liberal sekuler. Pada akhirnya Mursi kembali mengeluarkan

dekrit yang salah satunya berisi pencabutan dekrit sebelumnya sebagai upaya Mursi untuk meredam protes oposisi dan rakyat Mesir (Basyar, 2015).

Pencabutan dekrit rupanya tidak menyurutkan protes dari kaum oposisi yang terlanjur anti pemerintahan Mursi. Bahkan sebelum peringatan satu tahun kepemimpinan Mursi 30 Juni 2013, pemberontakan dari kelompok oposisi liberal sekuler yang melahirkan gerakan Tamarod menuntut Mursi turun dari jabatannya. Pemerintahan Mursi telah melenceng dari jalur demokrasi yang sedang tumbuh mekar di Mesir. Sikap otoriter yang ditunjukkan Mursi menjadikan Mesir berada dalam situasi demokrasi beku (*frozen democracy*), dimana demokrasi yang tumbuh pasca Revolusi 2011 menjadi layu sebelum berkembang.

Melihat gejolak politik yang melanda Mesir, Kepala SCAF, Abdel Fattah Al Sisi akhirnya memberikan ultimatum kepada Presiden Mursi untuk menyelesaikan konflik politik dalam waktu 48 jam sejak 1 Juli 2013. Mursi tidak menyangka, Al Sisi yang telah diangkat menjadi Kepala SCAF menggantikan Mohamed Hussein Tantawi justru mengambil langkah penggulingan kekuasaan terhadap dirinya setelah ia menolak ultimatum. Tepatnya pada 3 Juli 2013 malam, SCAF di bawah komando Al Sisi mengambil alih kekuasaan Presiden Mursi secara paksa. Tidak dipungkiri, Kudeta Militer yang mengakhiri kekuasaan Mursi sebagai presiden yang terpilih secara demokratis merupakan bentuk pencederaan demokratisasi di Mesir (Harian Suara Merdeka, 2013).

Pasca kudeta yang menggulingkan pemerintahan demokrasi Mursi, junta militer di bawah Abdel Fattah Al Sisi menguasai panggung politik. Ketua Mahkamah Konstitusi Mesir, Adly Mansour ditunjuk sebagai presiden pemerintahan sementara hingga pemilu presiden selanjutnya. Pemilu presiden yang digelar pada tahun 2014 hanya diikuti oleh dua kandidat. Dalam pemilu presiden yang digelar pada 26-27 Mei 2014, Al Sisi mendapatkan kemenangan mutlak dan mengalahkan lawan politiknya Hamdeen Sabahi yang merupakan tokoh kelompok *Nasseris*. Al Sisi memperoleh 96,93% pemilih dari suara pemilih sah sedangkan Sabahi hanya memperoleh 03,07% . Dengan kemenangan Al Sisi pada pemilu kali ini menjadikan Mesir kembali dipimpin oleh kalangan militer, setelah selama satu tahun dipimpin oleh Presiden Mursi dari kalangan sipil (Basyar, 2015, p. 3). Penelitian akan difokuskan pada munculnya rezim otoriter baru pasca kudeta militer 2013. Bagaimana kemudian karakteristik pemerintahan Mesir di bawah Presiden Abdel

Fattah Al Sisi dalam membangun kembali rezim otoriter baru? Tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja karakteristik pemerintahan Mesir pasca kudeta militer 2013.

B. Kerangka Pemikiran

Teori Model Otoriter Birokratik

Dalam buku Mohtar Mas'ood yang berjudul "Ekonomi dan Politik (Orde Baru 1966 - 1971)", Guillermo O'Donnell mengungkapkan bahwa teori model rezim Otoriter Birokratik (OB) memiliki sifat-sifat berikut (Mas'ood, 1989):

1. Pemerintah dipegang oleh militer, tidak sebagai diktator pribadi, melainkan sebagai suatu lembaga, berkolaborasi dengan "teknokrat" sipil. Ia mengemukakan, bahwa pengalaman otoritarian yang ia kategorikan ke dalam rezim OB seperti di Amerika Latin terbentuk atas peran serta dari para teknokrat dan militer profesional.
2. Pemerintah didukung oleh *entrepreneur* oligopolistik, yang bersama negara berkolaborasi dengan masyarakat bisnis internasional. Menurut O'Donnell, model rezim OB sebagian besar lebih menyandarkan pada sebuah koalisi antara elit-elit militer dengan pihak teknokrat bisnis yang dalam kerjanya memiliki keterkaitan atau asosiasi secara langsung dengan pemodal asing. Untuk itu dalam teori ini O'Donnell sangat mengaitkan masalah otoritarianisme dengan tahap pembangunan ekonomi.
3. Pengambilan keputusan dalam rezim OB bersifat birokratik-teknokratik, sebagai lawan pendekatan politik dalam pembuatan kebijaksanaan yang memerlukan suatu proses *bargaining* yang lama di antara berbagai kelompok kepentingan. Rezim Otoriterisme Birokratik ini bertujuan membuat keputusan yang sederhana, tepat dan efisien yang tidak memungkinkan adanya proses tawar-menawar atau *bargaining* yang lama, melainkan mencukupkan diri pada pendekatan "teknokratik-birokratik" dengan pertimbangan semata-mata "efisiensi". Rezim ini didukung oleh unsur koalisinya dari kelompok-kelompok yang paling mungkin dapat mendukung proses pembangunan yang efisien yaitu militer, teknokrat sipil, dan pemilik modal (baik domestik maupun luar negeri).
4. Massa didemobilisasikan. Melalui kebijakan dan ketetapan undang-undang, pemerintahan membatasi kebebasan sipil dalam dunia politik.

5. Untuk mengendalikan oposisi, pemerintah melakukan tindakan-tindakan represif. Kekerasan politik memang cenderung terjadi pada suatu sistem pemerintahan yang sangat otoriter-birokratis. Kekerasan politik berupa penghilangan orang, penangkapan, hingga pemberian hukuman hampir selalu digunakan oleh rezim otoriter yang berkuasa dengan alasan demi mempertahankan keutuhan bangsa. Selain itu, kekerasan politik dengan negara sebagai aktor utamanya juga didukung oleh pengaruh militer yang kuat dalam pemerintahan, bahkan pada taraf mengendalikan.

Di dalam isu demokratisasi di Timur Tengah, dinamika kehidupan politik mengalami fluktuasi. Hal ini juga terjadi di Mesir. Eksistensi demokrasi di Mesir masih dikatakan belum berkembang secara utuh. Pada tahun 2014, Mesir di bawah pemerintahan Presiden Abdel Fattah Al Sisi justru berujung pada penghidupan kembali rezim otoriter dimana sebelumnya upaya demokratisasi telah bangkit pasca Revolusi Mesir 2011. Hal ini ditunjukkan oleh Al Sisi dengan karakteristik pemerintahan otoriter yang mirip dengan beberapa karakteristik model rezim Otoriter Birokratik (OB) yang dicetuskan Guillermo O'Donnell, yaitu:

Pertama, pemerintah Mesir dipegang oleh militer tidak sebagai diktator pribadi, melainkan sebagai suatu lembaga, berkolaborasi dengan “teknokrat” sipil. Al Sisi memimpin Mesir. Di dalam memimpin Mesir, selain menjalankan pemerintahan yang bersifat militeristik, Al Sisi juga menempatkan beberapa teknokrat sipil sejak dirinya berkuasa di Mesir pasca kudeta militer tahun 2013 (Haryono, 2014).

Kedua, massa didemobilisasikan. Sebagai upaya membatasi ruang gerak kubu oposisi dalam mempengaruhi kebijakan di tingkat politik nasional, Presiden Al Sisi membubarkan Partai Kebebasan dan Keadilan (*Freedom Justice Party-FJP*) yang merupakan sayap politik kubu oposisi Ikhwanul Muslimin (BBC Indonesia, 2014).

Ketiga, untuk mengendalikan oposisi, pemerintah Mesir melakukan tindakan-tindakan represif. Kekerasan politik memang cenderung terjadi pada suatu sistem pemerintahan yang otoriter. Dalam memimpin Mesir, Presiden Al Sisi mengambil langkah represif terhadap oposisi Ikhwanul Muslimin karena telah menentang kebijakan pemerintah. Sejumlah peristiwa yang menunjukkan peningkatan tindakan represif yang dilakukan

Presiden Al Sisi terhadap anggota IM antara lain, penyiksaan, pembunuhan, penangkapan sepihak hingga vonis hukuman yang tidak adil (IRIB World Service, 2014)

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah library research dengan memanfaatkan data-data sekunder yang dikumpulkan datanya dari perpustakaan, buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik dan website. Untuk melengkapi data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dan unit analisa yang digunakan penulis adalah antara militer Mesir dan kelompok Ikhwanul Muslimin.

D. Hasil Penelitian

Pasca kudeta militer pada tahun 2013 yang menggulingkan Presiden Muhammad Mursi, Mesir kemudian dipimpin oleh pemerintahan sementara di bawah junta militer Al Sisi. Penangkapan Presiden Mursi oleh militer Mesir telah memicu kemarahan pendukungnya. Selama berbulan-bulan, Ikhwanul Muslimin terus-menerus melakukan demonstrasi mengecam tindakan kudeta yang dilakukan Al Sisi. Stabilitas keamanan di Mesir semakin memburuk, terlebih ketika junta militer Al Sisi melakukan tindakan represif terhadap oposisi Ikhwanul Muslimin. Aksi bentrokan yang terjadi antara pendukung Mursi dengan aparat keamanan mengakibatkan lebih dari 900 korban jiwa. Ratusan demonstran ditangkap dan dipenjarakan. Pemerintahan sementara Mesir kemudian memberlakukan Undang-undang Demonstrasi yang semakin membatasi gerak lawan politiknya. Sampai akhirnya, puncak kemarahan Ikhwanul Muslimin terjadi ketika Peradilan Mesir menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap 683 anggota Ikhwanul Muslimin pada April 2014 (IRIB World Service, 2014).

Sikap represif yang dilakukan Al Sisi ini semakin menguatkan dugaan rakyat Mesir bahwa tindakan tangan besi Al Sisi menandakan kembalinya rezim militer seperti pada masa pemerintahan otoriter Hosni Mubarak. Kubu oposisi menganggap kemenangan mutlak Al Sisi dalam pemilu presiden tahun 2014 dengan perolehan suara 98%, hanyalah sebuah rekayasa untuk melegitimasi kekuasaan junta militer Al Sisi yang telah berlangsung sejak kudeta militer tahun 2013. Terlebih, pemilu presiden tahun 2014 dilaksanakan tanpa melalui pemilu parlemen sebelumnya. Dalam membangun rezim otoriter baru ini, pemerintahan Al Sisi mirip dengan beberapa karakteristik model rezim Otoriter Birokratik (OB).

Pertama, pemerintahan dipegang oleh militer berkolaborasi dengan teknokrat sipil. Dalam membangun rezim otoriter baru di Mesir, Al Sisi tidak ingin mengulangi kesalahan sebagaimana yang dilakukan Menteri Pertahanan, Mohamed Hussein Tantawi pada saat Presiden Mubarak tumbang dengan tidak mengangkat dirinya sebagai presiden pemerintahan sementara setelah penggulingan Presiden Mursi. Al Sisi lebih memilih menunjuk Ketua Mahkamah Konstitusi, Adly Mansour sebagai presiden sementara Mesir. Dalam menjalankan transisi politik pasca kudeta, rezim militer Al Sisi didampingi oleh pemerintahan teknokrat hingga pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu parlemen (Suara Merdeka Online, 2013)

Pemerintahan sementara Mesir ini dipimpin oleh Perdana Menteri Hazem El Beblawi, seorang ekonom dan juga Mantan Menteri Keuangan Mesir. Sementara itu, Al Sisi tetap menempati posisi Menteri Pertahanan merangkap sebagai Wakil Perdana Menteri. Di posisi Menteri Dalam Negeri tetap ditempati oleh Mohammed Ibrahim. Ibrahim adalah satu-satunya menteri warisan pemerintahan Mursi. Kabinet pemerintahan sementara beranggotakan 35 orang. Dalam susunan kabinet yang didominasi kaum teknokrat dari kalangan liberal ini tidak tampak tokoh-tokoh dari partai Islam. (Choirul, 2013).

Setelah resmi menjadi Presiden Mesir, Al Sisi kemudian melantik Kabinet Baru pada 17 Juni 2014. Kabinet pertama Presiden Al Sisi terdiri dari sekitar 30 menteri dan dipimpin oleh Perdana Menteri Ibrahim Mahlab. Dalam Kabinet Baru Mesir, Presiden Al Sisi menempatkan empat perempuan dan beberapa teknokrat (Haryono, 2014). Sementara pada saat perombakan Kabinet kedua, Presiden Al Sisi kembali menempatkan seorang teknokrat. Kabinet kedua pemerintahan Mesir mencakup 16 menteri baru dan 33 kursi pembantu pemerintah. Seperti dilansir dari pemberitaan Reuters, salah seorang menteri yang menurut sang presiden merupakan pembantu terbaiknya diangkat menjadi perdana menteri menggantikan Ibrahim Mahlab. Ia adalah Sharif Ismail, yang menjabat sebagai menteri perminyakan dalam kabinet sebelumnya. Menurut pemerintah, Ismail dipandang sebagai teknokrat veteran yang berpengalaman. Sharif sempat bekerja di perusahaan minyak milik negara sebelum ia bergabung di kabinet pada 2013 (Pratama, 2015)

Kedua, pemerintahan melakukan demobilisasi massa. Pasca kudeta militer terhadap Presiden Mursi, kembalinya militer ke kancah politik Mesir menjadikan peranan sipil semakin lemah. Al Sisi telah memonopoli kekuasaan di balik pemerintahan sementara Mesir. Sejak Mahkamah Konstitusi membekukan parlemen yang didominasi oleh FJP,

pemerintahan sementara Mesir kemudian berjalan tanpa adanya parlemen. Hal ini semakin mempersempit ruang gerak oposisi Ikhwanul Muslimin dalam kehidupan politik. Terlebih, pemerintahan sementara Mesir di bawah kendali Al Sisi terus melakukan upaya-upaya demobilisasi massa dalam menghadapi pemberontakan kubu oposisi, Ikhwanul Muslimin. Menjelang pemilu presiden tahun 2014, pemerintahan sementara Mesir kembali menangguhkan pemilu parlemen yang rencananya akan dilangsungkan pada Maret 2014. Proses pemilu parlemen terpaksa harus ditunda lantaran Pengadilan Mesir menyatakan bahwa sebgai aturan pemilu tidak konstitusional (Samosir, 2015). Dengan dalih apapun, pelaksanaan pemilu presiden pada Mei 2014 dengan tanpa pelaksanaan pemilu parlemen adalah melanggar konstitusi. Hal ini semakin membuktikan adanya upaya pemerintahan sementara Mesir untuk membatasi gerak oposisi Ikhwanul Muslimin dalam pertarungan pemilu presiden 2014.

Tantangan berat lain bagi pemerintahan sementara Mesir adalah menghadapi gerakan protes yang menentang kudeta terhadap Muhammad Mursi. Pendukung Mursi, Ikhwanul Muslimin terus menerus melakukan aksi demonstrasi menuntut pengembalian legitimasi kekuasaan Mursi. Aksi demonstrasi yang diwarnai kekerasan mendorong pemerintah untuk menekan kelompok Ikhwanul Muslimin karena dianggap sebagai ancaman stabilitas keamanan Negara. Pemerintahan sementara Mesir di bawah junta militer Al Sisi kemudian menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris pada 25 Desember 2013. Terkait hal ini, semua aktivitas, pendanaan dan keanggotaan dalam kelompok IM adalah sebuah kejahatan. Pengumuman ini merupakan puncak ketegangan antara pemerintah dengan kelompok Ikhwanul Muslimin yang menggelar demonstrasi hampir setiap hari sejak kudeta militer 3 Juli 2013 (Auliani, 2013).

Melihat pergerakan Ikhwanul Muslimin yang sempat mendominasi kursi parlemen melalui partai FJP, Al Sisi yang telah resmi menjabat sebagai presiden Mesir pada Mei 2014 kemudian membubarkan FJP pada Agustus 2014. Melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Mesir, FJP dibubarkan dan seluruh asetnya disita negara. Keputusan pengadilan ini adalah keputusan final sehingga FJP tidak dapat mengajukan banding (Hardoko, Mesir Bekukan Sayap Politik Ikhwanul Muslimin, 2014). Peradilan terhadap kasus ini terjadi setelah Komite Hubungan Partai Politik pemerintah Mesir mengajukan keberatan dan menuduh FJP tidak memiliki landasan hukum. FJP yang didirikan pada tahun 2011 telah meraih mayoritas kursi parlemen dalam pemilu parlemen pertama Mesir yang

diselenggarakan secara demokratis setelah enam dekade. Tetapi, pada Juni 2012, Mahkamah Konstitusi membubarkan pemilu parlemen karena tidak konstitusional (BBC Indonesia, 2014).

Meskipun pemerintah Mesir telah melakukan upaya untuk mempersempit ruang gerak politik oposisi Ikhwanul Muslimin, namun jumlah pendukungnya yang begitu banyak membuat kelompok Islam ini tidak dapat disingkirkan begitu saja. Ikhwanul Muslimin terus mendesak pemerintah agar mewujudkan demokrasi seperti yang dijanjikan Al Sisi pada saat pencalonan dirinya pada pemilu presiden 2014. Terkait hal ini, pemerintah mengklaim pemilu parlemen yang dilaksanakan pada akhir 2015 adalah komitmen pemerintah terhadap demokrasi. Menurut pengamat politik, anggota Brookings Center for Middle East Policy di Washington, BHa.A. Hellyer, ia meragukan keefektifan parlemen ini dalam mengawasi eksekutif. Meskipun reformasi politik telah berjalan namun kemungkinan tidak akan ada perubahan yang signifikan dari hasil parlemen ini. Meskipun Dewan Perwakilan ini akan menyediakan 568 kursi, namun Sebanyak 448 kursi akan diisi oleh peraih suara terbanyak di pemilu, sementara 120 lainnya diduduki orang yang telah dipilih secara khusus untuk mewakili kaum perempuan, Kristen, dan anak muda. Di sisi lain, Presiden dapat menunjuk beberapa orang untuk masuk ke parlemen (Samosir, 2015).

Terkait hal ini, strategi Al Sisi yang gagal menyingkirkan Ikhwanul Muslimin setelah menghapus para pemimin lama, mendorong pemerintah Mesir melakukan pendekatan seperti yang dilakukan Hosni Mubarak. Pemerintah Mesir memutuskan untuk mendukung kepemimpinan baru Ikhwanul Muslimin sehingga mereka tidak berubah menjadi rival serius bagi kubu sekuler dan militer Mesir dengan menerima partisipasi minimal Ikhwanul Muslimin di kancah politik Mesir tanpa memegang peran penentu sama sekali. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan Al Sisi ini semakin membuktikan tindakan demobilisasi massa dalam membangun kembali rezim otoriter di Mesir.

Ketiga, pemerintah melakukan tindakan represif dalam mengendalikan oposisi. Sejak kudeta militer yang berhasil menggulingkan Presiden Mursi, kekuasaan junta militer Al Sisi berhasil menguasai pemerintahan Mesir. Di balik pemerintahan sementara yang dibentuk untuk menjalankan masa transisi pasca kudeta, Al Sisi banyak melakukan tindakan represif dalam mengendalikan oposisi. Mengingat, pendukung Mursi, Ikhwanul Muslimin terus-menerus melakukan gerakan protes menentang tindakan kudeta. Gerakan pembangkangan sipil yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin dan pendukungnya

dianggap sebagai ancaman stabilitas keamanan negara. Al Sisi mengaitkan hal ini sebagai kendala pemerintah dalam memperbaiki permasalahan ekonomi dan keamanan yang semakin memburuk sejak revolusi Mesir tahun 2011. Sehingga upaya pemerintahan Al Sisi dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan keamanan negara adalah dengan pendekatan represif yaitu menumpas oposisi Ikhwanul Muslimin yang kerap melakukan tindakan konfrontasi terhadap aparat keamanan.

Pasca kudeta militer, pendukung pro-pemerintahan Mursi, Ikhwanul Muslimin terus-menerus melakukan aksi demonstrasi menentang pemerintahan sementara Mesir. Menghadapi aksi demonstrasi yang semakin meluas, pemerintah melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap tokoh dan aktivis Ikhwanul Muslimin dengan tuduhan telah melakukan provokasi kepada rakyat Mesir untuk melawan pemerintahan sementara yang dibentuk oleh SCAF Mesir (Gafur, 2014, p. 95). Bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan kerap terjadi hingga mengakibatkan korban tewas dan luka-luka.

Tindakan represif pemerintah terus dilakukan hingga pada 14 Agustus 2014, aksi demonstrasi memuncak setelah dipicu oleh tindakan aparat keamanan yang membubarkan demonstran secara paksa menggunakan kendaraan lapis baja, bulldozer dan helikopter. Dalam aksi demonstrasi yang telah menewaskan 900 orang termasuk 100 tentara dan polisi, tiga jurnalis mancanegara juga turut menjadi korban tewas saat melaksanakan tugas reportase. Pasca terjadinya bentrokan dalam beberapa hari terakhir, demonstrasi para pendukung Mursi yang sebelumnya diikuti oleh puluhan ribu orang menunjukkan tanda-tanda menurun. Beberapa pihak menilai kekuatan organisasi tersebut telah menurun akibat penangkapan sejumlah pemimpinnya oleh pihak militer. (Marboen, 2013).

Selama perjalanan pemerintahan junta militer Al Sisi, Polisi Rahasia Mesir juga melakukan tindakan represif terhadap media dengan menangkap 20 wartawan yang dituduh bekerjasama dan memihak Ikhwanul Muslimin. Sebanyak 16 wartawan Mesir dan 4 wartawan asing ditangkap dan dipenjarakan dengan beberapa tuduhan, antara lain: Pertama, melakukan pertemuan illegal dengan kelompok Ikhwanul Muslimin yang telah dinyatakan sebagai organisasi teroris pada Desember 2014. Kedua, membantu organisasi teroris dalam memberi informasi, memasok peralatan dan uang, serta mempromosikan kelompok IM dengan menyiarkan kegiatan organisasinya. Ketiga, menyiarkan berita palsu (pembobongan publik) yang membahayakan kepentingan nasional dan keamanan

publik. Keempat, menyebarkan desas desus untuk meyakinkan masyarakat internasional bahwa Mesir mengalami perang saudara. Kelima, menggunakan hotel bintang lima Marriot, tempat mereka tinggal sebagai pusat penyiaran berita Al Jazeera (Muhaimin, 2013).

Tindakan represif junta militer Al Sisi ini semakin menuai protes dari Ikhwanul Muslimin. Ketegangan antara pemerintah dengan Ikhwanul Muslimin semakin memuncak menyusul pengadilan Mesir menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap 683 anggota Ikhwanul Muslimin termasuk Muhammad Mursi. Vonis hukuman mati ini telah menyulut protes di kalangan internal Mesir dan bahkan kecaman dari masyarakat internasional. PBB menyatakan kekhawatiran atas keputusan pengadilan Mesir tersebut dan menuntut pemerintah sementara Mesir untuk tetap berkomitmen dengan peraturan Hak Asasi Manusia internasional (IRIB World Service, 2014).

Di dalam sistem Peradilan Mesir yang juga mengikuti kebijakan keamanan junta militer Al Sisi, putusan hukuman vonis mati terhadap lebih dari 600 anggota Ikhwanul Muslimin dinilai tidak adil. Tindakan represif ini telah melanggar Hak Asasi Manusia. Namun, para pendukung pemerintahan Al Sisi meyakini bahwa kebijakan ini telah mengembalikan stabilitas relatif Mesir dan situasi keamanan. Mereka juga meyakini bahwa hak asasi manusia menjadi sia-sia ketika di masyarakat terdapat sebuah kelompok yang mengancam keamanan nasional (IRIB World Service, 2016).

Dalam laporannya, Lembaga HAM Internasional, Amnesty International mengecam keras kepolisian dan aparat atas penghilangan warga sipil dengan sengaja di Mesir sejak awal 2015. Korban sering mengalami penganiayaan, termasuk syok sengatan listrik pada bagian tubuh yang sensitif, juga pemerkosaan. Departemen Dalam Negeri Mesir menyangkal melakukan kesalahan, namun membenarkan laporan bahwa banyak orang berada dalam, tahanan, tanpa merinci apakah prosesnya sesuai hukum (DW.com, 2016).

Hingga satu tahun pemerintahan Mesir di bawah Presiden Al Sisi, tindakan represif militer terhadap oposisi terus berlangsung. Amnesty International mencatat, tindakan keras militer telah menyebabkan sedikitnya 41.000 orang ditangkap, ditahan dan didakwa melakukan tindak pidana dengan hukuman yang tidak adil. Otoritas Mesir menunjukkan, mereka tidak akan berhenti dalam upaya menghancurkan semua hambatan terhadap otoritas (Pascal, 2015).

E. Kesimpulan

Kembalinya rezim otoriter baru pasca kudeta militer Mesir tahun 2013 tidak terlepas dari kekuasaan militer Mesir yang telah mengakar di pemerintahan selama puluhan tahun. Selama lebih dari 50 tahun, rezim militer telah menguasai pemerintahan Mesir. Sejak kudeta militer yang dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser pada tahun 1952 berhasil menggulingkan kekuasaan Raja Farouk, Mesir berada di bawah kekuasaan Presiden yang otoriter, mulai dari Mohammad Naguib (1952-1954), Gamal Abdel Nasser (1954-1970), Anwar Sadat (1970-1981), hingga Hosni Mubarak (1981-2011). Pada masa pemerintahan Hosni Mubarak, militer Mesir semakin mendominasi pemerintahan dan menempati kedudukan tertinggi sejak dibentuknya SCAF Mesir. Di bawah rezim militer, rakyat Mesir tidak mendapatkan kebebasan dalam kehidupan politik. Pemerintah Mesir juga bersikap represif terhadap kubu oposisi yang melawan kebijakan pemerintah.

Pada tahun 2011, kekuasaan rezim militer Mesir akhirnya mengalami kejatuhan akibat gelombang revolusi *Arab Spring* berhasil melengserkan Hosni Mubarak dari kursi kepresidenan. Pasca revolusi, pemerintahan Mesir selanjutnya dipimpin oleh Presiden Muhammad Mursi yang terpilih secara demokratis pada pemilu presiden tahun 2012. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, presiden Mesir berasal dari kalangan sipil. Muhammad Mursi adalah tokoh Ikhwanul Muslimin, kubu oposisi yang selama ini menentang pemerintahan militer. Kemenangan Ikhwanul Muslimin dalam pemilu parlemen dan pemilu presiden pada tahun 2012 membuat posisi kalangan militer tersingkir dari pemerintahan.

Berbagai upaya dilakukan SCAF untuk tetap berada di pemerintahan Mesir. Merasa terancam dengan kekuasaan SCAF di legislatif, Presiden Mursi mengeluarkan dekrit yang membatalkan kekuasaan SCAF di tingkat legislatif. Tidak cukup sampai di sini, Presiden Mursi juga mengeluarkan dekrit yang menjadikan dirinya berkuasa tanpa batas. Menginjak satu tahun Pemerintahan Mursi, mulai merebak gerakan protes rakyat menuntut Mursi mundur dari jabatannya. Pemerintahan Mursi dinilai gagal mengatasi permasalahan ekonomi yang semakin memburuk. Peluang ini dimanfaatkan kalangan militer untuk kembali merebut kekuasaan di Mesir. Di bawah komando Abdel Fattah Al Sisi, militer Mesir melakukan kudeta terhadap Presiden Mursi pada 3 Juli 2013. Kudeta yang berhasil menggulingkan pemerintahan Mursi menjadi awal bangkitnya kembali kekuasaan militer di Mesir.

Pasca kudeta, Mesir kemudian dipimpin oleh pemerintahan sementara di bawah junta militer Al Sisi. Dalam struktur pemerintahan sementara, Al Sisi menunjuk Ketua Mahkamah Konstitusi, Adly Mansour sebagai presiden sementara dan menempatkan beberapa teknokrat sipil dalam tubuh kabinet. Kabinet pemerintahan sementara ini didominasi oleh kalangan liberal dan teknokrat tanpa melibatkan peran Ikhwanul Muslimin sebagai oposisi. Pada pemerintahan Al Sisi, penundaan pelaksanaan pemilu parlemen semakin mempersempit ruang gerak oposisi dalam kehidupan politik. Sejak berada di bawah kendali Al Sisi, pemerintah Mesir melakukan demobilisasi massa terhadap kubu oposisi Ikhwanul Muslimin, terlebih ketika pemerintah membubarkan kelompok Ikhwanul Muslimin dan menyatakan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris pada tahun 2013. Tidak cukup sampai di sini, pemerintah juga membubarkan FJP (Partai Ikhwanul Muslimin) pada Agustus 2014 dan melaksanakan pemilu parlemen pada Oktober 2015 tanpa kehadiran oposisi.

Di sisi lain, kudeta militer terhadap Presiden Mursi telah memicu kemarahan pendukungnya. Selama berbulan-bulan, Ikhwanul Muslimin terus-menerus melakukan demonstrasi mengecam tindakan kudeta yang dilakukan Al Sisi. Stabilitas keamanan di Mesir semakin memburuk, terlebih ketika junta militer Al Sisi melakukan tindakan represif terhadap oposisi Ikhwanul Muslimin. Aksi bentrokan yang terjadi antara pendukung Mursi dengan aparat keamanan mengakibatkan lebih dari 900 korban jiwa. Ratusan demonstran ditangkap dan dipenjarakan. Pemerintahan sementara Mesir kemudian memberlakukan Undang-undang Demonstrasi yang semakin membatasi gerak lawan politiknya. Sampai akhirnya, puncak kemarahan Ikhwanul Muslimin terjadi ketika Peradilan Mesir menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap 683 anggota Ikhwanul Muslimin pada April 2014.

Sikap represif yang dilakukan Al Sisi ini semakin menguatkan dugaan rakyat Mesir bahwa tindakan tangan besi Al Sisi menandakan kembalinya rezim militer seperti pada masa pemerintahan otoriter Hosni Mubarak. Kubu oposisi menganggap kemenangan mutlak Al Sisi dalam pemilu presiden tahun 2014 dengan perolehan suara 98%, hanyalah sebuah rekayasa untuk melegitimasi kekuasaan junta militer Al Sisi yang telah berlangsung sejak kudeta militer tahun 2013. Terlebih, pemilu presiden tahun 2014 dilaksanakan tanpa melalui pemilu parlemen sebelumnya.

Dalam pengkajian permasalahan yang diteliti, penulis menemukan fakta bahwa pemerintahan Mesir di bawah Presiden Abdel Fattah Al Sisi mirip dengan beberapa karakteristik model rezim Otoriter Birokratik (OB), yaitu: Pertama, pemerintahan dipegang oleh militer berkolaborasi dengan teknokrat sipil. Kedua, pemerintahan melakukan demobilisasi massa. Ketiga, pemerintah melakukan tindakan represif dalam mengendalikan oposisi.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, B. (2014). *Dinamika Pemerintahan Mesir Menuju Negara Yang Demokratis: Ditandai Persaingan Antara Demokrat Islam Dengan Militer*. Jurnal Online Westphalia Vo.13,NO.1 Januari-Juni.
- Agastya, M. (2013). *Arab Spring: Badai Revolusi Timur Tengah yang penuh Darah*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Auliani, P. (2013, Desember 26). *Pemerintah Sementara Mesir Berkeras Sebut Ikhwanul Muslimin Teroris*. Retrieved April 20, 2017, from Kompas.com: <http://internasional.kompas.com/read/2013/12/26/0451110/Pemerintah.Sementara.Mesir.Berkeras.Sebut.Ikhwanul.Muslimin.Teroris>
- Basyar, M. (2015). *Pertarungan dalam Berdemokrasi: Politik di Mesir, Turki dan Israel*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- BBC Indonesia. (2014, Agustus 10). *Mesir bubarkan 'partai' Ikhwanul Muslimin*. Retrieved April 20, 2017, from bbc.com: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/08/140810_egypt
- BBC Indonesia. (2014, Agustus 14). *Mesir Terapkan Keadaan Darurat Satu Bulan*. Retrieved April 20, 2017, from bbc.com: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/08/130814_mesir_darurat
- Choirul. (2013, Juli 17). *Presiden Mesir Ambil Sumpah Kabinet*. Retrieved April 20, 2017, from tempo.co: <https://m.tempo.co/read/news/2013/07/17/115497202/presiden-mesir-ambil-sumpah-kabinet>
- DW.com. (2016, Juli 13). *Makin Banyak Warga Mesir Dihilangkan*. Retrieved April 20, 2017, from dw.com: <http://www.dw.com/id/makin-banyak-warga-mesir-dihilangkan/a-19397447>
- Gafur, M. F. (2014, Desember). *Agama dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir dan Libya*. (M. Basyar, D. Mashad, I. Kartini, & Z. Djafar, Eds.) Jurnal Penelitian Politik, Volume 11 No. 2.

- Gunawan, R. (2011, Oktober 20). *Muammar Khadafi Tewas Dalam Kepungan Pasukan Oposisi*. Retrieved Desember 24, 2015, from Liputan 6.com: <http://news.liputan6.com/read/2120214/20-10-2011-muammar-khadafi-tewas-dalam-kepungan-pasukan-oposisi>
- Hardoko, E. (2013, Juli 7). *Pendukung dan Anti-Mursi Bentrok, 36 Tewas*. Retrieved April 18, 2017, from Tribunnews.com: <http://www.tribunnews.com/internasional/2013/07/07/pendukung-dan-anti-mursi-bentrok-36-tewas>
- Hardoko, E. (2014, Agustus 9). *Mesir Bekukan Sayap Politik Ikhwanul Muslimin*. Retrieved April 20, 2017, from kompas.com: <http://nasional.kompas.com/read/2014/08/09/23333241/Mesir.Bekukan.Sayap.Politik.Ikhwanul.Muslimin>
- Harian Suara Merdeka. (2013, Juli 5). *Al Sisi, Tokoh yang Diangkat dan Menggulingkan Mursi*. Harian SUARA MERDEKA.
- Harian Tempo. (2013, Juli 4). *Empat Alasan Presiden Mesir Digulingkan*. Retrieved Maret 16, 2017, from Tempo.com: <https://m.tempo.co/read/news/2013/07/04/115493383/empat-alasan-presiden-mesir-digulingkan>
- Haryono, W. (2014, Juni 17). *Presiden Mesir Lantik Jajaran Kabinet Baru*. Retrieved April 20, 2017, from metrotvnews.com: <http://m.metrotvnews.com/welcome-internasional/8N0ozoAK-presiden-mesir-lantik-jajaran-kabinet-baru>
- Hasan, H. (2010, Desember). *State versus society in Egypt: Consolidating Democracy or Upgrading Autocracy*. African Journal of Political Science and International Relations, Vol. 4 (9), 319-329.
- Hidriyah, S. (2012, Juli). *Terpilihnya Muhammad Mursi dan Babak Baru Demokrasi di Mesir*. Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. IV, No. 13/IP3DI.
- IRIB World Service. (2014, April 30). *Memburuknya Krisis di Negeri Piramida*. Retrieved April 17, 2017, from Iran Indonesian Radio-IRIB World Service: http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/79957-Memburuknya_Krisis_di_Negeri_Piramida
- IRIB World Service. (2014, April 30). *Memburuknya Krisis di Negeri Piramida*. Retrieved April 18, 2017, from IRAN Indonesian Radio-IRIB World Service: http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/79957-Memburuknya_Krisis_di_Negeri_Piramida
- IRIB World Service. (2016, Maret 7). *Transformasi Mesir di Era Jenderal al-Sisi (2-habis)*. Retrieved April 20, 2017, from indonesianirib.ir:

<http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/108186-transformasi-mesir-di-era-jenderal-al-sisi-2-habis>

- Kartini, I. (2015). *Kegagalan Empat Negara Arab dan Keberhasilan Indonesia dalam Masa Transisi Demokrasi*. Jurnal Hubungan Internasional Vol. III, No.2, Juli-Desember.
- Kistyarini (Ed.). (2012, Januari 22). *Partai-partai Islam Menang dalam Pemilu Mesir*. Retrieved April 24, 2017, from Kompas.com:
<http://internasional.kompas.com/read/2012/01/22/13393677/Partai-partai.Islam.Menang.dalam.Pemilu.Mesir>
- Kuncahyono, T. (2013). *Tahrir Square: Jantung Revolusi Mesir*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Lisbet. (2013, Juli). *Krisis Politik Di Mesir Dan Posisi Indonesia*. Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. V, No. 14/II/P3DI.
- Mahaputra, S., & Dewi, S. (2013, September 6). *Mesir Resmi Bubarkan Ikhwanul Muslimin*. Retrieved April 19, 2017, from antaranews.com:
<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/442140-mesir-resmi-bubarkan-ikhwanul-muslimin>
- Mandey, A. (2014, Desember 4). *Mubarak dan Demokrasi Mesir*. Retrieved Januari 7, 2016, from <http://m.news.viva.co.id/news/read/564884-mubarak-dan-demokrasi-mesir>
- Marboen, A. (Ed.). (2013, Agustus 23). *Bentrokan berdarah di Mesir dikhawatirkan terulang*. Retrieved from antaranews.com:
<http://www.antaranews.com/berita/392037/bentrokan-berdarah-di-mesir-dikhawatirkan-terulang>
- Mas'ood, M. (1989). *Ekonomi dan Struktur politik Order Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.
- Misrawi, Z. (2011, Oktober 26). *Menyongsong Libya Baru*. Retrieved Desember 27, 2015, from Kompas.com:
<http://internasional.kompas.com/read/2011/10/26/03322963/Menyongsong.Libya.Bar>
u
- Muhaimin. (2013, Desember 30). *Pasukan Mesir Tangkap 3 Wartawan Usai Siaran*. Retrieved April 17, 2017, from SINDONews.com:
<https://international.sindonews.com/read/822071/44/pasukan-mesir-tangkap-3-wartawan-usai-siaran-1388403802>
- Muttaqien, M. (2015). *Arab Spring: Dimensi Domestik, Regional dan Global*. Global & Strategis Vol.9 No.2, 262-276.
- Nashrullah, N. (Ed.). (2015, September 13). *Propaganda Demokrasi Di Tengah Musim Semi*. Retrieved Desember 24, 2015, from Republika.co.id:

<http://www.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/15/09/13/num73r1-propaganda-demokrasi-di-tengah-musim-semi>

- Nashrullah, N. (Ed.). (2015, September 13). *Republika*. Retrieved Desember 24, 2015, from Republika.co.id: <http://www.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/15/09/13/num73r1-propaganda-demokrasi-di-tengah-musim-semi>
- Pascal. (2015, Juni 30). *Amnesti Internasional Peringatkan Mesir*. Retrieved April 20, 2017, from kompas.com: http://cdn.assets.print.kompas.com/baca/internasional/timur-tengah/2015/06/30/Amnesti-Internasional-Peringatkan-Mesir?utm_source=bacajuga
- Pratama, S. (2015, September 19). *Presiden Mesir Lantik Kabinet Baru*. Retrieved April 20, 2017, from ccnindonesia.com: <http://www.ccnindonesia.com/internasional/20150919212946-120-79764/presiden-mesir-lantik-kabinet-baru/>
- Rahman, M. A. (2011, Oktober 25). *Revolusi Arab Bisa Memudarkan Hegemoni AS di Belahan Dunia Arab*. Harian KOMPAS.
- Ramly, L., & Irenewaty, R. (2015, September). *Kebijakan Politik Muhammad Mursi Sebagai Presdient Mesir (2012-2013)*. SOCIA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 12 No. 2.
- Riz. (2013, Juli 9). *5 Penguasa Yang Terguling Dalam Arab Spring*. Retrieved Desember 23, 2015, from Liputan6.com: <http://news.liputan6.com/read/634262/5-penguasa-yang-terguling-dalamarab-spring>, Selasa 9 Juli 2013, diakses pada 23 Desember 2015
- Rofiq, A. (2015, Juni). *Melacak Dinamika Sipil-Militer*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. II No.1.
- Samosir, H. (2015, Agustus 30). *Tiga Tahun Tanpa Parlemen, Mesir Gelar Pemilu Oktober Depan*. Retrieved April 20, 2017, from cnnindonesia.com: <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150831121722-120-75599/tiga-tahun-tanpa-parlemen-mesir-gelar-pemilu-oktober-depan/>
- Suara Merdeka Online. (2013, Juli 5). *Masa Depan Mesir Kian Tak Menentu*. Retrieved April 20, 2017, from suaramerdeka.com: <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/05/229921/Masa-Depan-Mesir-Kian-Tak-Menentu>
- Tempo.co. (2013, Juli 4). *Mursi Lengser, Kantor Al Jazeera Mesir Digerebek*. Retrieved Januari 6, 2017, from Tempo.co: <https://m.tempo.co/read/news/2013/07/04/115493472/mursi-lengser-kantor-al-jazeera-mesir-digerebek>
- VOA Indonesia. (2012, Agustus 23). *Mesir Ajukan Paket Dana Bantuan IMF*. Retrieved April 15, 2017, from voaindonesia.com: <http://www.voaindonesia.com/a/mesir-ajukan-paket-dana-bantuan-imf-/1494147.html>

Wibisono, B. (Ed.). (2013, November 2013). *Mahasiswa Tewas Saat Demo di Universitas Kairo*. Retrieved April 17, 2017, from antaranews.com:
<http://www.antaranews.com/berita/407214/mahasiswa-tewas-saat-demo-di-universitas-kairo>